

## Istri Anas Kebagian Rp 63 M

### ■ Menpora Andi Biarkan Penyimpangan ■ Peran Anas Tunggu Audit Tahap II

JAKARTA, TRIBUN - Audit investigatif BPK terhadap skandal proyek Hambalang, mengungkap aneka penyimpangan yang melibatkan 7 elite dari 46 pejabat. Menpora yang membiarkan penyimpangan, memantik kerugian negara Rp 243 miliar. Sebesar Rp 63 miliar di antaranya mengalir ke PT Dutasari Citralaras, perusahaan Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga ada penyalahgunaan anggaran dan kewenangan dalam megaprojek Hambalang. Audit menemukan aliran dana tak wajar terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional



TRIBUNINDO

”Menpora itu tahu, tapi dia membiarkan. Seharusnya dia bisa mencegah, tapi tidak dia lakukan.”

**IR ZULFADHLI**  
Anggota Panja Hambalang

(P3SON) Hambalang.

Dana tak wajar itu, mengalir ke perusahaan kontraktor dan subkontraktor.

Menurut Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, ada dua kejadian janggal yang terjadi dalam proses pencairan dana proyek Hambalang. Di mana hal itu akan menguatkan keterlibatan Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas

Urbaningrum.

”Dalam proses pencairan dana ada dua kejadian atau pihak yang tidak seharusnya menerima dana proyek ini,” kata Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa di Gedung DPR Jakarta (31/10)

Ali menunjuk dokumen tebal berisi hasil audit Hambalang. Dokumen itu

■ Bersambung ke Hal 7

## Istri Anas Kebagian Rp 63 M

merupakan audit Hambalang tahap II. "Justru yang terpenting dari audit Hambalang ini, selain nama Menpora adalah terkait aliran dananya ke perusahaan ini," tegasnya.

Data yang ditunjukkan Ali, mencatat sedikitnya tiga aliran dana tak wajar. Isinya menerangkan, RI (R Isnanta) selaku Kabag Keuangan Kemenpora menerbitkan surat perintah bayar SPM Rp 217.137.547.103 untuk pembayaran uang muka oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) melalui SPM ke rekanan pelaksana, meski pekerjaan belum dilaksanakan rekanan dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan belum diverifikasi pejabat berwenang.

Kemudian, TBMN (Teuku Bagus Muh Nur) selaku kepala DK 1 PT AK (Adi Karya) sekaligus kuasa KSO AW minta dan menerima pembayaran uang muka proyek Hambalang Rp 189.449.906.363 yang tidak seharusnya diterima.

Di poin ketiga, menerangkan jika MS (Machfud Suroso) selaku Dirut PT DC menerima uang muka Rp 63.300.942.000 yang tak seharusnya diterima. PT DC merupakan perusahaan milik Athiyah Laila. Istri Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum ini duduk sebagai komisaris PT DC. "Pencairan dana ini dilakukan, meski surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum ditandatangani pejabat pembuat komitmen dan Perdirjen Perbendaharaan," jelas Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan PT DC mendapat subkontraktor pembangunan proyek Hambalang senilai Rp 300 miliar. Anggaran sebesar itu didapat PT DC selaku subkontraktor dari Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Adhi Karya dengan PT Wijaya Karya.

Athiyah pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi Hambalang. Menurut informasi, setidaknya ada penerimaan Rp 50 miliar perusahaan tersebut dari Adhi Karya sebagai pemenang proyek.

**Rekayasa Lelang**  
Penyidikan skandal korupsi Hambalang, kali pertama diungkap mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin. Ia membeberkan Adhi Karya menggelontorkan dana Rp 100 miliar ke Anas dan Andi Mallarangeng serta sejumlah anggota DPR dan pejabat pemerintah.

Dari dana itu, Anas dapat Rp 50 miliar yang kemudian dipakai dalam pemenuhan pemilihan ketua umum PD saat Kongres PD di Bandung 2010. Sedangkan Andi mendapat Rp 5-10 miliar. Uang panas itu hadiah setelah Adhi Karya menang dalam tender. "Anas dan Andi adalah aktor korupsi proyek Hambalang," tegas Nazaruddin, usai diperiksa KPK sebagai saksi beberapa waktu lalu.

Kendati nama Anas tak tercantum dalam daftar 46 pejabat yang diduga terlibat penyimpangan proyek Hambalang, bukan berarti lolos. Laporan audit investigasi yang diserahkan Ketua BPK Hadi Purnomo ke DPR kemarin, memang hanya menyebut tujuh elite pejabat dari 46 pejabat yang terindikasi terlibat penyimpangan.

Dua menteri itu, Menkeu Agus Martowardojo dan Menpora Andi. Lainnya, Wamenkeu Anny Ratnawati (saat menjabat Dirjen Anggaran Kemenkeu), mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto hingga Bupati Bogor, dinyatakan ikut ber-

tanggungjawab.

"Anas, kan bukan pejabat negara. Jadi, namanya tak muncul. Kecuali dalam kaitan perusahaan yang ikut terlibat dalam kontrak pembangunannya," ujar sumber di BPK. Ketua BPK Hadi enggan menjelaskan tak masuknya nama Anas ini dalam laporan hasil audit.

Benarkah nama Anas muncul di laporan terkait kontraktor? Hadi hanya tersenyum. Kendati demikian, temuan audit investigasi BPK menunjuk adanya rekayasa lelang proyek. Rekayasa proses pelelangan pekerjaan konstruksi pembangunan proyek Hambalang untuk memenangkan Kerja Sama Operasi (KSO) Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk.

Rekayasa dilakukan dengan cara menggunakan standar penilaian berbeda dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi antara KSO Adhi/Wika dan rekanan lain. Standar penilaian untuk mengevaluasi KSO Adhi Karya dan Wijaya Karya menggunakan nilai pekerjaan Rp 1,2 triliun. Adapun standar penilaian untuk mengevaluasi rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan Rp 262 miliar.

Ketua KPK Abraham Samad dulu pernah menegaskan, Anas pernah mendapat mobil mewah, Harrier yang dibeli dari showroom Pecenongan, Jakarta Pusat, dari Adhi Karya dan Wijaya Karya.

"KPK dapat bukti itu dari kuitansi pembelian yang ada di komputer Adhi Karya yang disita KPK," beber Abraham. Menurut Nazaruddin mobil mewah itu juga hadiah yang diberikan kepada aktor skandal Hambalang.

**Dua Menteri**  
Dugaan keterlibatan Anas dikarenakan adanya koneksi pada kedua perusahaan kontraktor, di mana Anas diduga memenangkan Adhi Karya sebagai salah satu perusahaan kontraktor dalam proyek. Imbalannya Adhi Karya sanggup memberi dana Rp 100 miliar.

Benarkah? Ali Masykur tak mau memastikan, sebelum tuntas melakukan audit investigasi tahap II. "Terkait Anas, kita belum tahu. Karena kita tidak dalam posisi menyeret atau tidak menyeret orang, tapi sejauh ini belum ada hubungan dengan Pak Anas," jelasnya.

Ali menegaskan, BPK segera melakukan pemeriksaan audit investigasi Hambalang tahap 2, di mana audit difokuskan aliran dana pada kedua kontraktor. Sedangkan kejanggalan yang diduga melibatkan Menpora, terkait persetujuan Andi dan pembiaran penerimaan dan proses pencarian sumber aliran dana proyek.

Perbuatan itu melanggar Keppres 80 Tahun 2003. Namun, Andi mengaku tak tahu atas kejadian ini. Ali meyakini Andi mengetahui kejanggalan ini. "Sebagai menteri dia yang mengambil semua kebijakan, harusnya tahu. Berarti dengan kata lain, dia yang menyetujui penerimaan dan proses pencarian aliran dana," jelas Ali.

Pasalnya, ada proses pencarian dana perusahaan kontraktor dalam proyek ini yang sejak awal sudah janggal. Terlebih, kata dia saat kedua perusahaan ini terpilih menjalankan proyek Hambalang.

Nama Menpora Andi yang semula tak ada dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK per 1 Oktober 2012, kini dianggap terlibat pembiaran penyimpangan. "Menpora diduga membiarkan Sesmenpora

melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan, sebagaimana dimaksudkan PP 60 Tahun 2008," tegas Ketua BPK, Hadi Poernomo.

Kewenangan Menpora yang dimaksud adalah, keharusan mengetahui dan mengawasi jika ada kontrak proyek di Kemenpora yang bernilai di atas Rp 50 miliar. "Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, sehingga diduga melanggar Keppres," jelasnya.

Menpora Andi membantah membiarkan Sesmenpora menekan surat permohonan kontrak tahun jamak Hambalang. "Tak ada yang namanya pembiaran atau penyimpangan," kilahnya.

Anda dianggap melanggar Keppres 80 Tahun 2003 dan PP 60 Tahun 2008? "Saya berusaha melakukan sebaik-baiknya apa yang menjadi tugas saya. Saya belum lihat hasil audit BPK. Jika nanti sudah ada, tentu kami pelajari dan tindaklanjuti," ujar Andi.

Bagaimana dengan penetapan pemenang lelang proyek Hambalang tanpa pendelegasian wewenang? "Saya tak mau masuk substansi," kelitnya Menpora.

**Ruki Walk Out**  
Bagaimana dengan Menkeu? Menkeu justru menyambut baik hasil audit BPK. "Jadi saya sambut baik saja. Kalau di Kementerian Keuangan ada jajaran yang juga perlu memberikan penjelasan, saya yakin kami siap bekerjasama," kata Menkeu Agus.

Ia mengaku pernah diminta keterangan lembaga auditor negara. Meski begitu, Agus menolak dinyatakan terlibat skandal Hambalang yang menggunakan anggaran tahun jamak.

"Harus dipertanggungjawabkan, bahkan di K/L itu kalau harus mencairkan itu ada pernyataan tanggungjawab mutlak nanti dalam realisasi ini semua dokumen dalam keadaan yang baik, dan itu adalah bukti komitmen dia," tegas Menkeu.

Nama Andi sekarang kok muncul dalam LHP? Ketua BPK Hadi menyatakan sebelumnya audit belum selesai. "Tak ada intervensi, semua berjalan biasa. Kenapa tanggal satu sampai 30 (Oktober) ada perubahan, karena tanggal satu posisi lapornya harus sampai di situ, belum ada yang lain," kelit Hadi.

Yang pasti akibat berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, proyek Hambalang Rp 2,5 triliun bocor. "Adanya kelalaian atau kesengajaan pihak terkait menyebabkan indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 243,66 miliar sampai 30 Oktober 2012," tegas Hadi.

Rinciannya, Rp 116,930 miliar sebagai selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan (Rp189,45 miliar) dikurangi pengembalian uang muka saat pembayaran termin pada tahun 2010 dan 2011 (Rp 72,520 miliar).

Selain itu, Rp 126,734 miliar yang merupakan kelebihan pembayaran harga pada pelaksanaan konstruksi terdiri Mekanikal Elektrikal (ME) Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur Rp 51,010 miliar.

Ketika proses penyerahan laporan hasil audit ini, mantan Ketua KPK yang kini menjadi anggota BPK, Taufiequrrahman Ruki memutuskan keluar

ruang rapat setelah disindir Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Ruki keluar hanya beberapa saat setelah rapat dimulainya.

"Jadi kita dengarkan keterangan dari BPK agar bisa menjelaskan yang sebenarnya. Apalagi dengan adanya istilah intervensi itu bisa disampaikan," kata Priyo. Kata-kata politisi Golkar ini disambut senyum peserta rapat. Mereka semua juga kompak melihat ke arah Ruki yang pernah mengungkap indikasi intervensi, sehingga nama Menpora Andi tak ada dalam LHP BPK per 1 Oktober 2012.

Ruki pun hanya menunduk. Setelah 10 menit Ketua BPK Hadi memberi pemaparan, Ruki beranjak dari tempat duduknya. Entah dapat info dari mana, Priyo langsung mengemukakan. "Maaf teman-teman, Pak Ruki tak bisa melanjutkan karena maag," ujar Priyo.

Di luar rapat Ruki enggan memberikan keterangan. "Juru bicaranya Pak Hadi dan Pak Agung, saya sudah menyampaikannya," elaknya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Hambalang dari PD, Agus Hermanto menyatakan tak akan menghalangi proses hukum terkait kemungkinan keterlibatan Menpora yang notabene kader PD. Andi tercatat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PD.

"Kok menghalangi. Apalah artinya menghalangi. Kita ini kan terbuka semuanya. Kami memang kader Demokrat, tapi kalau ada masalah hukum biarlah penegak hukum bekerja," kata Agus Hermanto.

Anggota Panja Hambalang, Zulfadhli, meminta hasil audit tahap pertama ini harus jadi perhatian KPK. Sebab saat ini KPK baru menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 10 miliar, dari satu tersangka yaitu Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar.

Besarnya indikasi kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK, mengindikasikan banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. "Sejak lelang hingga pembayaran itu kan melibatkan banyak orang. Maka sangat mungkin banyak juga yang terlibat dalam kasus ini," kata Zulfadhli.

Zulfadhli mengatakan, dalam kasus ini Menpora tidak bisa lepas tangan begitu saja. Justru Menpora yang paling bertanggungjawab atas proyek Hambalang ini. "Menpora itu tahu, tapi dia membiarkan. Seharusnya dia bisa mencegah, tapi tidak dilakukannya," katanya.

Menurut Zulfadhli, telah ada pengakuan dari Menpora kalau dia mengetahui apa yang dilakukan Sesmenpora Wafid Muharram. Sebaliknya, Wafid Muharram juga telah mengakui kalau apa yang dilakukannya sepengetahuan Menpora sebagai atasannya.

Secara logika pula, kata Zulfadhli, tidak mungkin Sesmenpora berani mengambil kewenangan Menpora tanpa sepengetahuan Menpora. Bahkan Zulfadhli menduga, apa yang dilakukan Sesmenpora adalah berdasarkan petunjuk Menpora.

Dugaan keterlibatan Menpora tersebut, menurut Zulfadhli harus menjadi pertimbangan KPK untuk semakin meningkatkan penyelidikan. Jangan sampai pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini, justru lepas dari jeratan hukum. (tribunnews/few/tic/rol/dtc/inv/ari)